

## KESENJANGAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA MEMPERBESAR JURANG KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

**Sakura Indah Sari<sup>1</sup>, Odemus Bei Witono<sup>2</sup>**

Alumni Program Magisten Manajemen, Atma Jaya Jakarta, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
Orang tua siswa yang peduli terhadap kualitas pendidikan, Tangerang, Indonesia<sup>1</sup>  
Perkumpulan Strada, Jalan Gunung Sahari 88, Jakarta Indonesia<sup>2</sup>  
Kandidat Doktor STF Driyarkara, Jakarta, Indonesia<sup>2</sup>  
[sakura.indahsari@gmail.com](mailto:sakura.indahsari@gmail.com)<sup>1</sup>, [beiwitono@jesuits.net](mailto:beiwitono@jesuits.net)<sup>2</sup>  
\*korespondensi: [sakura.indahsari@gmail.com](mailto:sakura.indahsari@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pendidikan (termasuk insitutsi pendidikan) yang seharusnya berperan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) demi terbukanya peluang perbaikan kesejahteraan, sebaliknya justru memperbesar kesenjangan kesenjangan sosial ekonomi masyarat. Sebagian besar institusi pendidikan berkualitas terpatok harga yang tinggi. Di sisi lain, institusi pendidikan dengan harga terjangkau, cenderung memiliki kualitas yang kurang baik. Selain itu, secara jumlah penduduk, kelompok-kelompok ekonomi menengah atas justru memiliki angka kelahiran (*fertility rate*) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelas menengah bawah. Artinya jumlah orang yang mampu secara ekonomi semakin sedikit tetapi memiliki akses luas terhadap pendidikan berkualitas. Sementara jumlah orang yang tidak mampu secara ekonomi semakin banyak tetapi terbatas mengakses pendidikan berkualitas baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data dari media massa, artikel, lembaga survei, serta berbagai literatur tentang pendidikan. Berdasarkan data tersebut, penulis melakukan analisa dan melakukan wawancara kepada narasumber yang terlibat langsung dalam bidang pendidikan. Ditemukan bahwa situasi kesenjangan kualitas pendidikan memang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan terjadi: kesenjangan kualitas SDM yang semakin ekstrem, rendahnya kemampuan adaptasi lintas kelas karena sekolah sudah terfragmentasi secara kelas sosial ekonomi, dan pada akhirnya kualitas Pendidikan yang tidak merata malah memperbesar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

**Kata kunci:** angka kelahiran, kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia.

## THE GAP IN THE QUALITY OF INDOONESIAN EDUCATION IS ENLARGING THE SOCIO-ECONOMIC GAP IN SOCIETY

**Sakura Indah Sari<sup>1</sup>, Odemus Bei Witono<sup>2</sup>**

Alumni Magister Management Program, Atma Jaya Jakarta, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
Student's parent who concerns about education quality, Tangerang, Indonesia<sup>1</sup>  
Strada Association, Jalan Gunung Sahari 88, Jakarta Indonesia<sup>2</sup>  
Doctoral Candidate STF Driyarkara, Jakarta, Indonesia<sup>2</sup>  
[sakura.indahsari@gmail.com](mailto:sakura.indahsari@gmail.com)<sup>1</sup>, [beiwitono@jesuits.net](mailto:beiwitono@jesuits.net)<sup>2</sup>  
\*Correspondence: [sakura.indahsari@gmail.com](mailto:sakura.indahsari@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research aims to demonstrate that education, including educational institutions, which are expected to improve the quality of human resources (HR) and expand opportunities for enhancing welfare, on the contrary actually increases the socio-economic gap in society. Most

prestigious educational institutions have high tuition fees, while those with affordable fees often offer lower quality education. Additionally, the upper middle-class economic groups tend to have lower fertility rates compared to the lower middle class. This trend results in a declining number of economically capable individuals who have broader access to high-quality education. Conversely, the economically disadvantaged face increasing challenges in accessing quality education. This study uses a qualitative method. The author collected data from mass media, articles, survey institutions, and various educational literature. Based on those data, the author conducted analysis and interviews with sources who were directly involved in the education field. The findings indicate a gap in educational quality. If this continues, it could lead us into: increasingly extreme disparities in human resources quality, reduce adaptability across classes because schools are fragmented by socio-economic class, and ultimately widen the socio-economic gap in society.

**Keywords:** fertility rate, quality of education, quality of human resources.

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah satu faktor penentu dalam memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui pendidikan (baik formal maupun non formal), SDM diharapkan bisa meningkatkan kemampuan intelektualitas dan atau keterampilan di dalam hal-hal tertentu. Berbekal pada kemampuan intelektualitas dan keterampilan tersebutlah, SDM-SDM ini mampu memiliki daya lebih, minimal untuk mengembangkan dirinya sendiri. Tentu baik juga, apabila pengembangan diri itu kemudian juga memberi dampak yang lebih luas pada orang lain di sekitarnya.

Namun, yang terjadi tidaklah demikian. pendidikan yang ada saat ini, memiliki persoalannya sendiri, yaitu kualitas pendidikan yang tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan juga pada kualitas SDM yang dihasilkan. Kesenjangan ini dimulai sejak siswa masuk ke sekolah. Sekolah yang dituju, kebanyakan sudah terseleksi dengan sendirinya, dari segi lokasi dan dari segi biaya. Sehingga siswa-siswa yang berada di daerah-daerah tidak strategis cenderung akan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Begitu juga dari segi harga, akses terhadap pendidikan berkualitas akan menyesuaikan kemampuan ekonomi orang tuanya.

Sekolah yang sudah terkotak-kotak berdasarkan lokasi dan harga ini, ternyata berbanding lurus dengan berbagai hal lain yang harus diterima sebagai konsekuensi logisnya, seperti kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses menuju sekolah, serta akses terhadap program-program lain di luar sekolah yang mendukung keberhasilan peserta didik. Kesenjangan dalam ketiga hal ini secara sadar ataupun tidak, sudah terpola dari awal sehingga kita dapat menebak hasil akhir dari SDM nantinya akan seperti apa dari sejak siswa bergabung dengan sekolah. Sementara sekolah-sekolah swasta, tentu tidak selemas sekolah negeri dalam hal pembiayaan, karena mereka harus membiayai dirinya sendiri dengan uang yang diperoleh dari para peserta didik. Beberapa sekolah swasta secara konsisten masih menerapkan sistem subsidi silang, yang memungkinkan kelompok ekonomi menengah bawah dapat juga mengakses pendidikan yang sama dengan kelompok ekonomi lainnya. Sayangnya, tidak semua sekolah swasta memiliki kebijakan ini, dan ada juga yang menerapkan kebijakan ini tetapi membatasi, misalnya hanya ada kuota 10% siswa yang tidak mampu yang bisa diterima dengan mekanisme subsidi silang ini.

Idealnya pendidikan memiliki standar yang kurang lebih setara, terutama sekali yang diharapkan adalah sekolah-sekolah negeri. Sehingga SDM-SDM yang dihasilkan setidaknya dapat memenuhi standar minimum kualitas SDM yang dibutuhkan. Tetapi kesenjangan kualitas ini, justru semakin memisahkan kelompok SDM “berkualitas baik” dan “berkualitas kurang baik”.

Sekolah-sekolah Katolik pun tidak luput dari keeksklusifan tersebut. Sebagian besar telah “mematok” harga tertentu sebagai harga minimum. Apabila seseorang mampu secara akademis tetapi tidak didukung dengan kemampuan finansial, maka akan disarankan mencari sekolah lain yang pas dengan “kantong”-nya. Cukup banyak sekolah Katolik lain yang memiliki harga lebih terjangkau. Secara khusus untuk sekolah Katolik, refleksinya menjadi, apakah memang demikian “panggilan” kita saat ini? Bila hal ini terus dilanjutkan, apakah kemudian kita tidak menjadi pendukung segregasi sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Kita turut serta mengubah sekolah yang merupakan ruang publik, menjadi ruang-ruang eksklusif yang terkotak-kotak berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.

Penulis mencoba mengaitkan hal di atas dengan *fertility rate* berdasarkan kelas ekonomi. Berdasarkan data BPS mengenai *fertility rate* berdasarkan tingkat pengeluaran, ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pengeluaran maka *fertility rate*-nya semakin rendah.

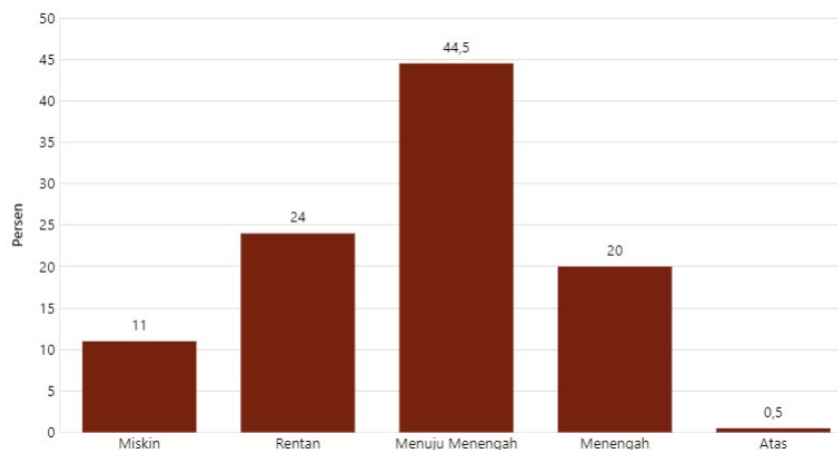
Tabel 1. Fertility Rate berdasarkan Tingkat Pengeluaran

Tingkat Pengeluaran	Fertility Rate	
	2017	2012
Terbawah	2.9	3.2
Menengah bawah	2.6	2.7
Menengah	2.3	2.5
Menengah atas	2.3	2.4
Teratas	2.1	2.2

Sumber: Biro Pusat Statistik (bps.go.id)

Padahal secara jumlah mayoritas di Indonesia ini adalah kelompok kelas menengah (Lidwina, 2020). Menurut data Bank Dunia pada 2016, penduduk kelas menengah Indonesia telah mencapai 44,5%. Pengeluaran kelompok ini sebesar Rp 532 ribu sampai Rp 1,2 juta per kapita per bulan. Sementara untuk kelompok miskin (pengeluaran kurang dari Rp 354 ribu per kapita per bulan) dan rentan (Rp 354-532 ribu). Lalu, setelah masyarakat kelas menengah, ada kelas menengah (Rp 532 ribu sampai Rp 1,2 juta) dan kelas atas (lebih dari Rp 6 juta). Proporsi pembagian secara jumlah untuk masing-masing kelas tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Persentase Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Tingkat Pengeluaran (2016)



Sumber: Databoks.katadata.co.id

Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. Secara tingkat pengeluaran, bonus demografi tersebut akan kita tuai dari kelompok ekonomi menengah. Namun apabila kita tidak mengelola kelompok ini dengan benar, baik secara mikro maupun makro Indonesia akan rentan terhadap *middle trap income*. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. (Setkab, 2023).

Pada kondisi ini, SDM kita sudah terlalu mahal untuk menjadi buruh sehingga bukan menjadi pilihan untuk usaha padat karya tetapi juga belum cukup mampu bersaing dengan negara maju yang memiliki kemampuan SDM dan teknologi yang lebih baik. Hal tersebut dapat kita lihat sebagai peluang bila kita mampu memperbaiki kualitas SDM untuk melampaui kualitas menengah menuju kualitas baik sehingga mengurangi persaingan di kelas menengah dan menambah jumlah SDM yang berkualitas baik pada level yang lebih tinggi dan jumlah lebih banyak. Harapannya tentunya, 20 tahun lagi, SDM yang akan kita petik adalah SDM yang memiliki kualitas di atas rata-rata baik sehingga cukup mampu melampaui jebakan ekonomi kelas menengah sekaligus jebakan kualitas SDM kelas menengah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif studi pustaka. Data-data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang sudah dipublikasikan. Penulis tidak melakukan survei langsung melainkan mengutip data-data statistik yang sudah tersedia. Selain data statistik terpublikasi, referensi juga diambil dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menunjukkan situasi pendidikan Indonesia saat ini.

Langkah-langkah (LP2M, 2023) yang dilakukan dalam proses analisis adalah menentukan pertanyaan penelitian, hal yang ingin dijawab dari penelitian ini. Kemudian, penulis mengumpulkan studi-studi yang relevan dengan topik yang dibahas. Cukup banyak studi yang membahas mengenai kesenjangan di dunia pendidikan tetapi penulis mencoba menyaring studi-studi tersebut berdasarkan lokasi, studi-studi yang diambil adalah studi-studi yang ada di Indonesia. Topik-topik yang dipilih terutama yang berhubungan langsung dengan kesenjangan. Sebagai data pendukung, penulis juga mencari data-data statistik dan data dari media massa yang mendukung.

Dalam analisa, penulis mencoba mengabstrasikan data-data yang diperoleh dari studi-studi terdahulu. Mememntakan data-data tersebut dalam kerangka analisa dan mencoba menarik benang merah dari berbagai studi tersebut dan dihubungkan dengan situasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia.

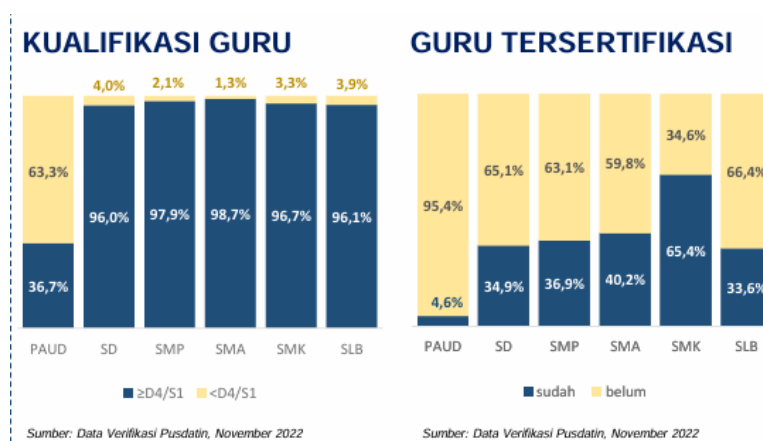
### Hasil dan Pembahasan

Dari berbagai literatur, kesenjangan pendidikan itu memang terjadi. Kesenjangan terjadi dalam berbagai aspek yang kemudian saya coba kelompokkan menjadi kualitas SDM, fasilitas, dan akses. Dari keempat aspek di atas, akhirnya terkait dengan harga dan lokasi.

#### *Kesenjangan Kualitas Tenaga Pengajar*

Kesenjangan kualitas guru di Indonesia telah menjadi pembahasan klasik. Ketimpangan kuantitas maupun kualitas tenaga pendidik (Amelia, 2019; Hidayat, 2017) menjadi salah satu dari tiga problematika kesenjangan pendidikan di Indonesia selain sarana prasarana dan kurikulum. Kesejahteraan dan kompetensi guru merupakan hal yang mempengaruhi rendahnya kualitas guru (Veirissa, 2021).

Gambar 2. Diagram Kualitas Guru dari Segi Kualifikasi dan Sertifikasi



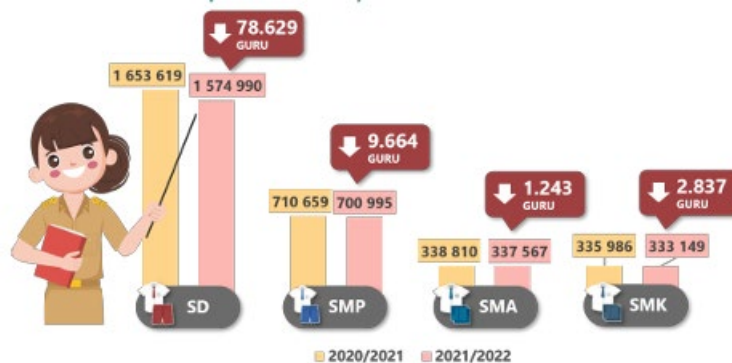
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data di atas (Kemendikbud, Neraca Pendidikan Daerah, 2022) menunjukkan, dari segi pendidikan, sebenarnya untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB, sudah lebih dari 96% memiliki ijazah D4 atau S1. Namun untuk guru-guru pada jenjang PAUD, hanya 37% saja yang

sudah memiliki ijazah D4/S1. Meski demikian, sebagian besar guru, lebih dari 60% guru masih belum tersertifikasi sebagai guru (PERSEN, 2023).

Studi lain, tentang program pertukaran guru Indonesia dengan Korea Selatan juga menunjukkan bahwa memang ada kesenjangan kualitas guru, selain standarisasi kualitas, penelitian itu juga menunjukkan bahwa ada program penilaian kinerja yang tidak hanya untuk formalitas saja (Indartiningsih, 2023). Hasil Uji Kompetensi Guru menunjukkan hanya menunjukkan 10 provinsi saja yang bisa lolos standar (Maulipaksi, 2016).

Gambar 3. Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022



Catatan: Guru yang dimaksud termasuk Kepala Sekolah

Sumber: Biro Pusat Statistik

Secara kuantitas, jumlah guru di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak. Berdasarkan data BPS (BPS, Catalog Statistik Pendidikan 2022, 2022), total guru yang ada di Indonesia mencapai 3 juta guru. Namun, apabila kita merujuk kembali pada data di atas, sebagian besar guru masih belum tersertifikasi sehingga kualitas guru tersebut, belum dapat diketahui apakah telah memenuhi standar kompetensi minimum atau belum.

Faktor kesenjangan guru ini, bukan hanya dari kuantitas dan kualitas guru itu sendiri, tetapi ternyata kesenjangan juga terjadi pada lokasi keberadaan guru. Terjadi penumpukan guru berkualitas di daerah perkotaan saja (Nasution, 2014). Daerah-daerah terpencil harus bertahan dengan jumlah guru yang relatif tidak bertambah. Di sebuah desa, jumlah guru hanya sekitar 3-4 orang, berbeda dengan daerah perkotaan yang jumlah gurunya bisa mencapai 11-17 orang (Amelia, 2019).

Problematika kesenjangan kualitas SDM ini, terkait juga dengan tingkat kesejahteraan guru. Profesi sebagai guru tidak lagi menjadi menarik dan menjadi profesi pilihan. Salah satu indikator yang terlihat, berdasarkan data OJK dari delapan kelompok Masyarakat yang terlibat pinjol, yang tertinggi adalah kelompok guru, yaitu sebesar 42% (Ali, 2024). Hal ini berpengaruh terhadap standarisasi perekrutan para guru, yang juga menjadi salah satu poin penting untuk dalam kaitannya dengan menjaga kualitas guru (Utami, 2019).

Situasi ini, sangat berbeda dengan sekolah-sekolah elit di kota besar. Sekolah-sekolah yang secara finansial cukup mampu, mereka dapat memiliki guru yang berkualitas salah satunya karena dapat memberikan remunerasi yang cukup layak. Selain itu, secara kualitas, guru-guru juga secara berkelanjutan mendapatkan program-program pengembangan kompetensi. Sekolah pun mampu memberikan kuliah lanjutan bagi guru-guru yang masih

lulusan sarjana agar bisa mendapatkan gelar pasca sarjana. Situasi ini tentunya sangat baik untuk meningkatkan kualitas guru-guru di perkotaan.

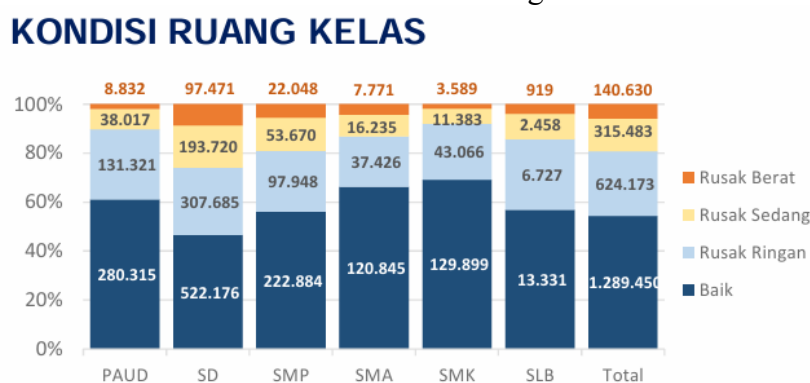
Pemerintah sebenarnya memiliki program pengembangan guru, yang disebut sebagai Program Pendidikan Guru Penggerak. Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru (Kemendikbud, n.d.).

Hingga saat ini sudah ada 8 angkatan yang telah mengikuti Pendidikan Guru Penggerak sejak 2020 s.d. Mei 2023 (Kemendikbud, n.d.), dengan total guru yang sudah mengikuti program ini sekitar 100 ribu guru. Dibandingkan dengan jumlah guru di Indonesia sebanyak 3 juta guru, jumlah ini belum mencapai 10% dari keseluruhan total guru yang saat ini ada. Program ini, kiranya dapat diteruskan mengingat beberapa studi menunjukkan bahwa program ini cukup memberikan dampak positif (GTK, 2023) dalam praktek di sekolah (Adiansha, 2022; Umboh, 2023; Satriawan, 2021). Meskipun, ada juga ekkses-ekkses dampak negatif yang terjadi (Soetrisno, 2024).

### Fasilitas

Kesenjangan terkait fasilitas, mencakup hal-hal yang sifatnya mendasar, seperti gedung sekolah. Fasilitas sekolah dianggap penting dan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa (Nasution, 2023). Meski dirasa penting dan mendukung tetapi kondisi fasilitas dasar di beberapa sekolah masih belum memadai dan menjadi permasalahan (Azzahra, 2022).

Gambar 4. Kondisi Ruang Kelas



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin, November 2022

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan data di atas, masih cukup banyak ruang kelas yang termasuk kategori baik. Masih sekitar 50-60%, artinya masih ada 40% lebih yang butuh perbaikan, baik karena kerusakan ringan, sedang, maupun berat.

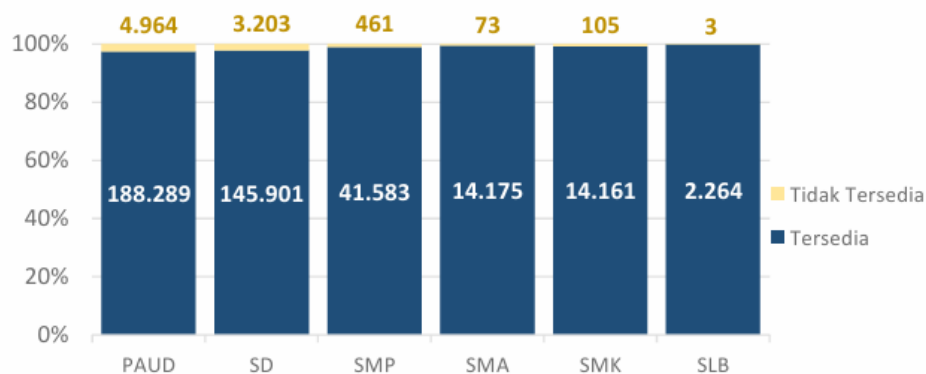
Kondisi ruang kelas yang rusak terjadi tidak hanya di daerah pedalaman tetapi juga di daerah yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, seperti di SD Jampang, Bogor (Lestari, 2021) dengan kondisi ruang kelas yang tidak layak untuk belajar. Hal serupa terjadi juga di salah satu sekolah di Kota Banyuwangi (PIKI, 2021). Berdasarkan data di atas memang benar bahwa

masih ada ribuan sekolah dengan kondisi bangunan yang masih jauh dari standar layak sebuah ruang kelas.

Kondisi fasilitas lain yang juga penting untuk menunjang proses belajar mengajar adalah ketersediaan aliran listrik. Data berikut menunjukkan bagaimana ketersediaan listrik di setiap jenjang sekolah. Secara umum sebenarnya sebagian besar sekolah sudah memiliki aliran listrik. Meski secara persentase tidak banyak tetapi sekolah-sekolah yang masih belum memiliki akses listrik jumlahnya masih ribuan. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini.

Gambar 5. Kondisi Akses Listrik

### KONDISI AKSES LISTRIK



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin, November 2022

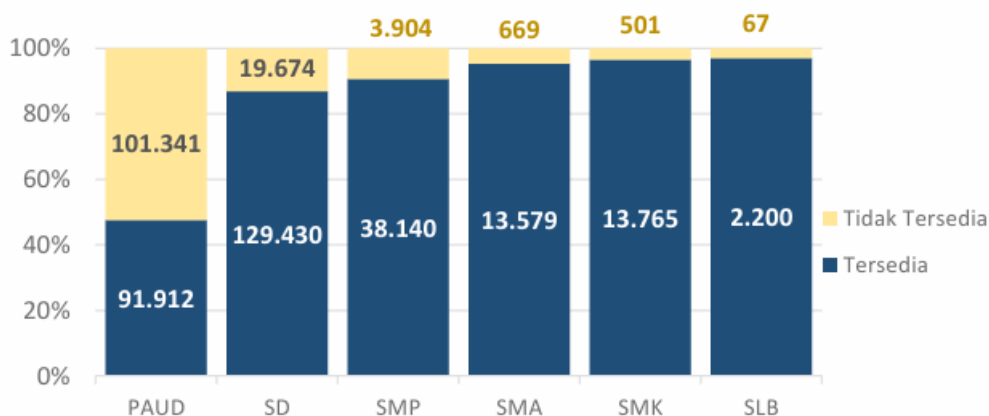
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Begitu juga ketersediaan jaringan internet, sudah tersedia hampir di semua jenjang pendidikan. Yang masih belum adalah pada sekolah-sekolah PAUD, masih 60% PAUD masih belum memiliki akses internet.

Gambar 6. Kondisi Akses Internet



## KONDISI AKSES INTERNET



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin, November 2022

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Itu baru terkait fasilitas dasar. Sementara ada fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti lapangan olah raga, laboratorium, perangkat komputer, perpustakaan termasuk koleksi pustaka di dalamnya, belum tentu dimiliki oleh semua sekolah.

Terkait dengan fasilitas, kita melihat bahwa sekolah-sekolah swasta dengan biaya yang mahal, pasti memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan lebih baik. Sekolah swasta yang tidak terlalu mahal, maka fasilitas pendukungnya juga setara dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Sementara sekolah-sekolah negeri, karena semua biaya pendidikan gratis dan pembiayaan diperoleh dari pemerintah, maka penyediaan fasilitas lebih dipengaruhi dari hal lain, misalnya lokasi. Kedekatan lokasi dengan daerah perkotaan lebih membuka peluang adanya penyediaan ataupun perbaikan fasilitas yang lebih cepat dibandingkan dengan lokasi-lokasi di daerah terpencil.

### Akses

Akses yang dibahas di dalam tulisan ini mencakup tiga hal, pertama, akses menuju Gedung sekolah secara fisik. Kedua, akses untuk bisa diterima dan bersekolah di sebuah sekolah. Ketiga, terkait akses yang dibukakan oleh sekolah kepada para siswanya.

Pertama, akses menuju Gedung sekolah secara fisik. Tentu kita pernah mendengar bahwa siswa-siswa yang harus menyeberangi jembatan/sungai atau harus berjalan kaki dengan cara yang cukup jauh untuk dapat mengakses gedung sekolah (Vito & Krisnani, 2015). Dalam hal ini berarti ketersediaan sekolah di daerah terpencil sangat terbatas dengan cakupan wilayah yang luas, sehingga lokasi sekolah dan lokasi tempat tinggal siswa berjarak cukup jauh. Semakin ke kota, kemudahan akses mencapai Gedung sekolah jauh lebih mudah. Selain ada banyak pilihan sekolah baik negeri maupun swasta, ada juga banyak alternatif transportasi yang dapat digunakan untuk menuju sekolah. Dengan adanya system zonasi, dari segi akses, harusnya Lokasi sekolah dan tempat tinggal akan berada pada Lokasi yang berdekatan.

Kedua, terkait dengan akses untuk dapat diterima dan bersekolah di sebuah sekolah. Akses ini berkaitan dengan kemampuan anak itu sendiri, kapasitas sekolah, serta kemampuan finansial keluarga apabila sekolah tersebut berbayar. Sekolah-sekolah dengan kualitas yang

baik, biasanya mempunyai mekanisme penyearangan tertentu. Hal ini tentu dirasa perlu dari pihak sekolah yang mengetahui standar kualitas Pendidikan mereka yang membutuhkan kemampuan tertentu dari calon peserta didiknya. Hal ini erat kaitannya juga dengan kapasitas sekolah. Seleksi dilakukan agar siswa yang masuk adalah siswa-siswa yang memiliki prestasi tertentu.

Namun di sisi lain, ada juga hal yang membatasi akses untuk bisa bersekolah di sebuah sekolah, yaitu finansial. Hal ini tentu berlaku pada sekolah swasta. Sekolah swasta yang baik, pada umumnya memiliki standar harga yang juga tinggi. Sebagai Gambaran, berikut ini beberapa informasi biaya pendaftaran dan uang sekolah di beberapa sekolah di Jakarta (Fadhilah, 2022).

Tabel 2. Data Uang Pangkal dan SPP Sekolah-Sekolah di Jakarta

<b>Sekolah</b>	<b>Uang Pangkal</b>	<b>SPP</b>
SD Cikal Cilandak	Rp 104.300.000 (non-sibling)	Rp 3.800.000
	Rp 93.900.000 (sibling)	
SD Kupu-kupu	Rp 49.700.000	Rp 2.450.000
Sekolah Al Azhar Pusat	Rp 38.000.000 (TK Al Azhar)	Rp 2.200.000
	Rp 44.300.000 (umum)	
SD Kembang	Rp 52.000.000	Rp 46.200.000/tahun
SD Bina Gita Gemilang	Rp 34.000.000	Rp 9.300.000/3 bulan
SD Highscope	Rp 70.000.000	Rp 6.600.000
Sekolah Gemala Ananda	Rp 9.000.000/tahun	Rp 2.520.000
SDK 6 BPK Penabur	Rp 28.100.000	Rp 2.850.000
Gandhi Memorial Intercontinental School	Rp 88.000.000 (+/-)	
Perguruan Cikini	Rp 13.000.000	Rp 800.000
SD Tunas Bangsa	Rp 11.700.000	Rp 1.100.000
SD Melania	Rp 4.000.000	Rp 500.000
SD Global Islamic School	Rp 30.500.000	Rp 1.850.000
SD Swasta Embun Pagi	Rp 3.800.000/tahun	Rp 2.700.000
	Uang Fasilitas	
	Rp 29.000.000	

SD Tarakanita 5	Rp 16.000.000	Rp 1.200.000
SD EMIISc	Rp 20.000.000	Rp 1.100.000
SD Ar Rahmah	Rp 11.500.000	Rp 900.000
SD Jakarta Islamic School Joglo	Rp 26.000.000	Rp 2.000.000
Narada International School	Rp 28.800.000	Rp 2.950.000
Ananda Islamic School	Rp 24.300.000	Rp 1.200.000

Sebagai data pembanding, saya akan coba sampaikan beberapa data rata-rata penghasilan pekerja di beberapa provinsi di Jawa. Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik dan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok profesi. Dalam tabel ini, hanya empat kategori saja dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Mengacu pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat bahwa penghasilan rata-rata tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta. Dua yang teratas berada di kelompok Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis, yaitu Rp 8.824.817 dan kelompok Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan, yaitu Rp 10.617.707. Provinsi lain yang menempati posisi kedua dan ketiga adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tabel 3. Rata-rata Penghasilan menurut Kelompok Profesi

<b>PROVINSI</b>	<b>Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis</b>	<b>Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan</b>	<b>Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis</b>	<b>Tenaga Usaha Penjualan</b>
DKI Jakarta	8.824.817	10.617.707	5.621.970	5.215.172
Jawa Barat	4.190.014	8.933.638	3.877.990	2.997.424
Jawa Tengah	2.831.701	5.033.170	2.756.441	NA
DI Yogyakarta	4.369.647	5.028.316	2.928.091	1.902.181
Jawa Timur	2.738.767	6.320.697	3.197.568	2.285.504
Banten	5.672.752	NA	4.452.364	3.907.740

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS, Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024, 2024)

Data lain dari *Indonesia Salary Guide 2024* yang diterbitkan oleh Persol Kelly, rentang penghasilan pegawai itu cukup jauh dari 5 juta per bulan sampai dengan 100 juta per bulan, tergantung dari level jabatan dan bidang usaha. Artinya nilai rata-rata yang ditampilkan dalam tabel di atas berasal dari sebuah rentang nilai yang cukup luas.

Berdasarkan kedua gambaran di atas, biaya sekolah dan rata-rata penghasilan pekerja, jelas terlihat bahwa hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses sekolah yang swasta yang berbiaya tinggi. Orang kebanyakan, yang memiliki penghasilan rata-rata 10 juta per bulan, tentu memiliki pilihan yang lebih terbatas dalam memilih sekolah.

### *Pengaruh Harga dan Lokasi*

Harga dan lokasi cukup banyak mempengaruhi tiga kesenjangan di atas. Saya mencoba memetakan pengaruh harga dan lokasi terhadap situasi kesenjangan yang terjadi, menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Kesenjangan dan Faktor Harga dan Lokasi sebagai Pendukung

<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Harga</b>	<b>Lokasi</b>
<b>Kualitas Guru</b>	Sekolah swasta dengan biaya tinggi lebih mampu memberikan kesejahteraan lebih terhadap para guru. Tuntutan para orang tua terhadap guru juga tinggi sehingga guru-guru terus mengembangkan diri.	Tidak banyak guru yang mau mengajar di daerah pedalaman. Sehingga ada penumpukan guru di area perkotaan.
<b>Fasilitas</b>	Fasilitas sekolah dengan harga yang mahal, sudah pasti lebih baik dibandingkan sekolah yang berbiaya murah.  Sementara untuk sekolah negeri, fasilitas masih belum merata standarnya untuk setiap sekolah.	Sekolah di daerah terpencil lebih besar kemungkinan tidak memiliki fasilitas yang layak. Meski demikian, sekolah yang relatif dekat dengan wilayah perkotaan juga masih ada yang belum memiliki fasilitas yang layak.
<b>Akses – menuju Gedung sekolah</b>	Harga tidak terlalu berpengaruh terhadap kemudahan akses menuju gedung sekolah.	Lokasi sekolah menjadi hal utama yang menentukan kemudahan akses menuju Gedung sekolah. Ada sekolah yang jauh dari rumah para siswa sehingga sulit dicapai.

<b>Akses – mendaftar sebagai siswa</b>	<p>Kemampuan finansial keluarga menjadi salah satu penyaring utama untuk dapat mengakses sekolah-sekolah yang berkualitas baik.</p> <p>Cukup banyak sekolah-sekolah swasta, terutama, yang memiliki kualitas baik dan harus dipatok dengan biaya tinggi. Meskipun orang tua tahu bahwa sekolah itu baik, tetapi tidak semua orang dapat mengakses. Sehingga pilihannya yang tersisa, Kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga siswa.</p>	<p>Sistem zonasi yang diberlakukan saat ini, membatasi pilihan siswa untuk dapat masuk ke sekolah negeri yang diinginkan karena pertimbangannya adalah lokasi terdekat. Hanya siswa dengan prestasi tertentu yang memiliki sedikit lebih banyak pilihan untuk masuk ke sekolah negeri.</p> <p>Sementara sekolah swasta tidak terlalu terpengaruh dengan lokasi.</p>
<b>Akses – program pendukung</b>	<p>Sekolah-sekolah berkualitas baik, memiliki program-program Kerjasama dengan berbagai lembaga lain di luar sekolah untuk dapat memberikan akses kepada siswanya mendapatkan nilai lebih, misalnya akses beasiswa, akses program pertukaran pelajar dalam dan luar negeri.</p>	<p>Program pendukung ini tentu akan jauh lebih mudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di lingkungan perkotaan.</p>

*Tidak Semua Sekolah adalah Ruang Publik*

Sekolah swasta terutama cenderung murni menjadi ruang privat dan komersil, hampir tidak ada ruang lagi untuk orang-orang dari kelompok sosial menengah bawah untuk bisa mengakses pendidikan tersebut. Dengan kemampuan finansial sekolah-sekolah ini mampu memberikan kualitas terbaik bagi para siswanya. Mereka tidak lagi bergulat dengan kondisi bangunan rusak, ketiadaan listrik atau akses internet. Bahkan yang jauh lebih baik dari itu, mampu disediakan.

Tentu sekolah swasta komersil tidak dapat “dimintai” pertanggung jawaban untuk menurunkan biaya atau memberi peluang kepada kelompok menengah bawah agar dapat mengenyam pendidikan di sekolah mereka. Yang menjadi tumpuan harapan perubahan adalah sekolah-sekolah negeri yang masih harus berbenah terutama sekolah-sekolah yang masih harus bergulat dengan fasilitas-fasilitas dasar. Setidaknya pemerintah dapat memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh anak Indonesia dengan standar tertentu.

Harapan lainnya adalah sekolah-sekolah swasta berbasis agama, yang selain memiliki kepentingan komersial tetapi masih mengimbangi dengan kebutuhan misi panggilannya, misalnya sekolah-sekolah Katolik. Selain memang harus membiayai dirinya sendiri, sekolah Katolik juga memiliki misi sosial. Maka kedua sekolah inilah yang diharapkan lebih bisa memberikan peran dalam mempersempit kesenjangan kualitas SDM di Indonesia.

#### *Kesenjangan Pendidikan dan Fertility Rate*

Terkait dengan *fertility rate* atau tingkat kesuburan berdasarkan kelompok pengeluaran, ada kecenderungan kelompok menengah atas akan semakin kecil jumlahnya karena dari jumlah yang sedikit, *fertility rate* pada kelompok ini adalah yang terendah. Sebaliknya kelompok menengah bawah, dari jumlah yang sudah besar, memiliki *fertility rate* yang lebih besar.

Tabel 5. Asumsi Penambahan Penduduk

Kelompok Pengeluaran	TFR 2017	Persentase Penduduk	Jumlah Jiwa	Prediksi	Penambahan Penduduk
Terbawah	2.9	11%	31 juta	45 juta	14 juta
Menengah bawah	2.6	24%	67,7 juta	88 juta	20,3 juta
Menengah	2.3	44,5%	125 juta	144 juta	19 juta
Menengah atas	2.3	20%	56 juta	64,5 juta	8.5 juta
Teratas	2.1	0,5%	1,4 juta	1,5 juta	0,1 juta

\*) Asumsi jumlah penduduk Indonesia 282 juta jiwa.

\*\*\*) *Total Fertility Rate (TFR)* adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

Perhitungan di atas didasarkan pada asumsi, untuk memberikan gambaran bahwa pada kelompok menengah dan menengah bawahlah penambahan penduduk akan besar. Pada kelompok pengeluaran inilah kita benar-benar mengalami “bonus demografi” pada 20 tahun mendatang. Tetapi justru pada kelompok inilah kelompok yang rentan terhadap akses pendidikan.

### Kesimpulan

Kesenjangan pendidikan terjadi dalam tiga aspek, yaitu kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses. Meski tidak semua, tetapi ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan harga (biaya sekolah) dan lokasi. Sejak awal, masuk ke dalam sebuah institusi pendidikan, siswa sudah terkotak-kotak kelompok tidak mampu, hampir pasti masuk ke sekolah-sekolah berkualitas menengah ke bawah. Kecil kemungkinan mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah yang baik. Dengan *fertility rate* yang lebih tinggi pada kelas menengah bawah, apabila tidak diperhatikan maka 2045, generasi yang akan kita tuai adalah generasi yang banyak secara kuantitas tetapi sebagian besar memiliki kualitas yang tidak diharapkan.

### Daftar Pustaka

- Ali, M. (2024, April 29). Peristiwa: Liputan 6. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/5584106/guru-paling-banyak-terjerat-pinjol-dpr-indikator-rentannya-kualitas-pendidikan-ri>
- Amelia, Chairunnisa. (2019). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 3, 775-779.
- Azzahra, N. (2022, November 26). Tekno & Science: Kumparan. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/nurul-azzahra-1669446039263959432/problematika-sarana-dan-prasarana-pendidikan-di-sekolah-terpencil-1zKA8qT4Mbc/4>
- BPS. (2022). Catalog Statistik Pendidikan 2022. Biro Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>
- BPS. (2024, Juli 1). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI1NSMx/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-jenis-pekerjaan-utama--2024.html>

- Fadhilah, H. (2022, November 15). Retrieved from <https://www.haibunda.com/parenting/20221101200412-61-289298/21-sd-swasta-favorit-terdekat-di-jakarta-cek-fasilitas-hingga-rincian-biayanya>
- GTK, T. D. (2023, Februari 25). (D. A., Ed.) Retrieved from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/02/dampak-positif-program-organisasi-penggerak-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan>
- Hidayat, Anwar. (2017). Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan sebagai Pengaruh Era Globalisasi. *Jurnal Justisi Hukum*, 2 (1), 15-25.
- Indartiningsih, Duhwi. (2023). Kualitas Guru di Indonesia dan Korea Selatan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5 (5), 2019-2030.
- Kemendikbud. (2022). Neraca Pendidikan Daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Kemendikbud. (n.d.). Retrieved from <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detil-program/>
- Kemendikbud. (n.d.). Retrieved from <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/lini-masa/>
- Lestari, N. (2021, November 2). Retrieved from <https://iainutuban.ac.id/2021/11/02/kurangnya-sarana-dan-prasarana-menghambat-proses-belajar-mengajar/>
- Lidwina, A. (2020, February 20). Datapublish: Databoks Katadata. Retrieved from Databoks Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/masyarakat-menuju-kelas-menengah-kelompok-terbesar-penduduk-indonesia>
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). (2023, Maret 16) Retrieved from <https://lp2m.uma.ac.id/2023/03/16/mengenal-analisis-meta-definisi-bagaimana-melakukannya/>
- Maulipaksi, Desliana. (2016). *7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diperoleh dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015>.
- Nasution, Aulia Khairani Br., Hakim, Nurhaliza., Ayunita, Siska. (2023). Kurangnya Fasilitas Sekolah Berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa TK Aulia. *Jurnal Sentra Pendidikan Anak Usia Dini*, 2 (1), 18-25. doi: <https://doi.org/10.51544/sentra.v2i1.3577>
- Nasution, Efrizal. (2014). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1-10.
- PERSEN, S. (Writer). (2023). [Motion Picture]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=wgeDmKOKPrY>
- PIKI. (2021, Juli 18). Retrieved from <https://grafikanews.com/berita-kurangnya-fasilitas-sarpras-di-salah-satu-sekolah-di-banyuwangi.html>
- Satriawan, Wahyu., Santika, Iffa Dian., Naim, Amin. (2021). Guru Penggerak dan Transformasi Sekolah dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11 (1). doi: <https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i1.7633>
- Setkab, H. (2023, Maret 13). Opini: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/indonesia-harus-keluar-dari-ancaman-middle-income-trap/>
- Soetrisno, M. (2024, April 9). Retrieved from <https://temanggung.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2617949446/dampak-negatif-dari-implementasi-program-guru-penggerak-apakah-ada-kecenderungan-kompetisi-yang-tidak-sehat?page=all>
- Utami, Sri. (2019). Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia melalui Peningkatan Kualitas Personal, Profesional, dan Strategi Rekrutmen Guru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2 (1), 518-527.



- Veirissa, Audi Hifi. (2021). Kualitas Guru di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 267-272
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. doi:DOI: 2. 10.24198/jppm.v2i2.13533.